

# TATA KELOLA CYBER SECURITY

## pada pemerintahan daerah



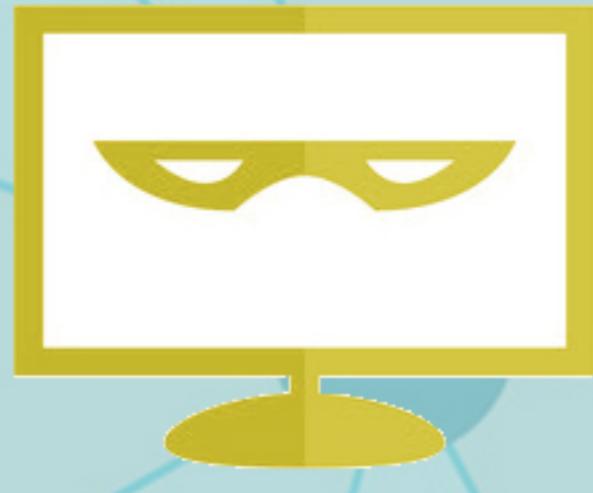
### PERMASALAHAN

Perkembangan teknologi komunikasi melalui media maya (cyber), harus disertai dengan kesadaran terhadap potensi ancaman kejahatan (cybercrime).

Contoh kegiatan cybercrime:



pencurian data  
(sumber daya informasi)



pembajakan akun  
(email, social network)



malware/malicious  
code, fraud, spionase



cyber warfare  
(perang di dunia maya)

Tata kelola cyber security sangat diperlukan oleh pemerintah daerah, terutama jika terkait dengan pengembangan e-government, demi terciptanya pelayanan publik yang baik dan berbasis online.

### KEGUNAAN CYBER SECURITY pada pemerintahan daerah



mengamankan hal  
terkait KEPERLAKUAN  

- penyalahgunaan medsos
- black campaign
- real count Pilkada
- peningkatan partisipasi
- sosialisasi



mencegah POTENSI  
KONFLIK dari medsos  

- potensi konflik di facebook  
terbawa ke kehidupan nyata
- konten muatan SARA
- hoax
- hate speech



meningkatkan  
PELAYANAN PUBLIK  

- menjaga otentitas informasi
- menjaga kerahasiaan  
informasi yang termasuk  
dalam kategori informasi  
yang dikecualikan



E-COMMERCE



DIPLOMATI  
INTERNASIONAL

### REKOMENDASI



#### Penataan Cyber Security

- menambah SDM berkompeten
- peningkatan anggaran pembangunan keamanan siber
- penyediaan perangkat teknologi modern
- membentuk peraturan terkait sistem keamanan siber skala nasional.



#### Penguatan Kapasitas Teknologi Informasi

anggota KPU & Bawaslu harus memahami bahwa TI agar dapat terjadi sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih, pengamanan data kepemiluan, serta mencegah penyalahgunaan media sosial.



#### Pengembangan Political Will di Pemerintah Daerah

- pencerdasan masyarakat untuk menangkal hoax
- mencegah provokasi di media
- mengembangkan sistem pemerintahan berbasis online